

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majene sebagai salah satu perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib merumuskan kebijakan dan strategi yang dtuangkan dalam perencanaan strategis. Perencanaan tersebut merupakan perencanaan yang sistimatis yang disusun dengan memperhitungkan secara spesifik dan berkelanjutan tentang perubahan kearah kondisi yang diinginkan organisasi dimasa depan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majene ini merupakan dokumen perencanaan yang berisikan arahan visi, misi, tujuan, target, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan kehutanan dan perkebunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majene selama lima tahun ke depan (2012-2016). Dokumen ini disusun berdasarkan analisis strategis atas potensi, peluang, permasalahan dan tantangan terkini yang dihadapi pembangunan kehutanan dan perkebunan selama lima tahun ke depan.

Oleh karena itu, dokumen Renstra ini dijadikan acuan dan arahan bagi Jajaran Birokrasi di lingkungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majene dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan kehutanan dan perkebunan periode

2012-2016 secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi baik di dalam maupun antar sektor terkait.

Renstra Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majene disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah Kabupaten Majene Tahun 2012-2016 dan sekaligus menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majene setiap tahun. Disamping Renja tersebut harus berpedoman pada Renstra juga harus mengaju dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJM setiap tahun.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- d. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor        Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majene Tahun 2012 – 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2012 Nomor        ).
- i. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Badan dan Kantor Lingkup Pemerintah Kabupaten Majene
- j. Peraturan Bupati Majene Nomor   .... Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Majene.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Stratejik (RENSTRA) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majene Tahun 2012-2016 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan

serta sebagai instrumen dalam mengukur kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majene.

Tujuan penyusunan RENSTRA adalah untuk merumuskan Kebijakan dan Program Strategis dalam menyelenggarakan pembangunan Kehutanan dan Perkebunan periode tahun 2012-2016 dan sekaligus sebagai tolak ukur evaluasi kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majene.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majene tahun 2012 - 2016 dapat diilustrasikan dalam uraian sebagai berikut :

##### **Bab I – Pendahuluan,**

**1.1. Latar Belakang,** menjelaskan secara ringkas pengertian Renstra Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majene, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan renstra, keterkaitan renstra dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Kabupaten Majene dengan Rencana Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majene.

**1.2. Landasan Hukum,** memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas

dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

**1.3. Maksud dan Tujuan**, memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majene

**1.4. Sistematika Penulisan**, menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majene, serta susunan garis besar isi dokumen.

**Bab II – Gambaran Pelayanan SKPD**, memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majene dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majene dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majene yang dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majene ini, yang terurai sebagai berikut:

**2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD**, memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas

Kehutanan dan Perkebunan, struktur organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majene, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majene (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majene, memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majene dalam menjalankan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majene, memuat tingkat capaian kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majene berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majene periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan atau indikator kinerja pelayanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majene dan atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majene, mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majene, hasil telaahan terhadap RTRW,

dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

**Bab III – Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi,**  
meliputi :

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majene, menjelaskan permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel T.IV.C.9 yang dilakukan pada C.1.2 (Analisis Pelayanan SKPD).

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan SKPD (Tabel T.IV.C.9), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra, mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari

pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis, merivieu kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan SKPD
2. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L
3. Sasaran Jangka Menengah dari Renstra provinsi/kabupaten/kota
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD

Selanjutnya dikemukakan metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut.

**Bab IV – Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan,** dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi SKPD sebagai berikut:



**4.1 Visi dan Misi SKPD**, pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majene.

**4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**, dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majene.

**4.3 Strategi dan Kebijakan**, dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majene dalam lima tahun mendatang.

**BAB. V. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif.**

**BAB VI. Indikator Kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majene Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

## **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN MAJENE**

### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majene merupakan salah satu organisasi perangkat daerah Kabupaten Majene yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2011, Tanggal 30 September 2011, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Majene.

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majene mempunyai struktur organisasi organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, yang terdiri dari :
  - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
  - b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - c. Kepala Sub Bagian Keuangan
3. Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial
  - a. Kepala Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
  - b. Kepala Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial
  - c. Kepala Seksi Perbenihan Tanaman Hutan
4. Kepala Bidang Perlindungan Hutan dan Usaha Kehutanan
  - a. Kepala Seksi Perlindungan Hutan
  - b. Kepala Seksi Penataan dan Pemanfaatan Hutan
  - c. Kepala Seksi Peredaran Hasil Hutan

5. Kepala Bidang Budidaya dan Produksi Perkebunan
  - a. Kepala Seksi Pembenihan dan Budidaya Tanaman Perkebunan
  - b. Kepala Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan
  - c. Kepala Seksi Penataan dan Pengembangan Sumber Daya Perkebunan
6. Kepala Bidang Usaha dan Pengolahan Hasil Perkebunan
  - a. Kepala Seksi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perkebunan
  - b. Kepala Seksi Perizinan dan Pembinaan Usaha Perkebunan
  - c. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majene yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 tahun 2011; tanggal 30 September 2011 mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
  - a. Tugas Pokok

Membantu Kepala Daerah menyelenggarakan kewenangan bidang Kehutanan dan Perkebunan berdasarkan prinsip otonomi dengan tugas pembantuan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan atau berdasarkan ketentuan yang berlaku.

b. Fungsi

Mengkoordinir, mengarahkan, membimbing, membina dan memberdayakan unsur manajemen satuan kerja perangkat daerah bidang Kehutanan dan Perkebunan, yang meliputi :

- a) Perumusan renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah serta petunjuk pelaksanaan, petunjuk operasional dan petunjuk teknis pelaksanaan kewenangan bidang Kehutanan dan Perkebunan.
- b) Pengorganisasian renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah pelaksanaan kewenangan Kehutanan dan Perkebunan;
- c) Pelaksanaan renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah pelaksanaan kewenangan bidang Kehutanan dan Perkebunan;
- d) Pengendalian dan pemantauan pelaksanaan renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah pelaksanaan kewenangan bidang Kehutanan dan Perkebunan.
- e) Evaluasi pelaksanaan renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah kewenangan bidang Kehutanan dan Perkebunan;

- f) Pelaporan hasil pelaksanaan renstra program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah kewenangan bidang Kehutanan dan Perkebunan;
- g) Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan tentang pelaksanaan renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah kewenangan bidang Kehutanan dan Perkebunan;
- h) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit pelaksana teknis Dinas;
- i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pemimpin Daerah:

## 2. Sekretaris

### a. Tugas pokok

Membantu Kepala Dinas melakukan koordinasi dan atau memfasilitasi pelaksanaan kewenangan bidang Kehutanan dan Perkebunan yang berhubungan dengan urusan organisasi meliputi perencanaan, evaluasi, pelaporan, pelayanan administrasi, umum, kepegawaian dan keuangan.

### b. Fungsi

Mengkoordinir, mengarahkan, membimbing, membina dan memberdayakan unsur manajemen organisasi bidang Kehutanan dan Perkebunan meliputi :

- a) Penyusunan Bahan dan penyusunan RKA, DPA dan dokumen perencanaan perumusan renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah serta petunjuk pelaksanaan, petunjuk operasional dan petunjuk teknis pelaksanaan kewenangan bidang kehutanan dan perkebunan;
- b) Pelaksanaan, pengorganisasian, pemantauan dan pengendalian kebijakan yang meliputi; bidang umum dan administrasi kepegawaian, penatausahaan keuangan, pelayanan teknis perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- c) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara berkala dan periodik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada atasan;
- d) Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan tentang pelaksanaan renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah kewenangan bidang kehutanan dan perkebunan;
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### 3. Bidang Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial

#### a. Tugas Pokok

Membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan, menghimpun, mengolah dan melaksanakan kegiatan di bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial.

b. Fungsi

Membantu mengkoordinir dan atau memfasilitasi kegiatan di bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial, meliputi :

- a. Penyiapan rumusan kebijakan teknis Pengelolaan DAS, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Perhutanan Sosial serta Perbenihan Tanaman Hutan.
- b. Pelaksanaan Kebijakan Teknis Pengelolaan DAS, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Perhutanan Sosial serta Perbenihan Tanaman Hutan.
- c. Penyusunan petunjuk pelaksanaan, petunjuk operasional dan petunjuk teknis pengelolaan DAS, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Perhutanan Sosial serta Perbenihan Tanaman Hutan.
- d. Pemberian bimbingan teknis Pengelolaan DAS, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Perhutanan Sosial serta Perbenihan Tanaman Hutan.
- e. Pelaksanaan evaluasi Pengelolaan DAS, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Perhutanan Sosial serta Perbenihan Tanaman Hutan.
- f. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan pemberian sarana/pertimbangan kepada atasan.

- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

#### 4. Bidang Perlindungan Hutan dan Usaha Kehutanan

##### a. Tugas Pokok

Membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan, menghimpun, mengolah dan melaksanakan kegiatan di bidang Perlindungan Hutan dan Usaha Kehutanan

##### b. Fungsi

Membantu mengkoordinir dan atau memfasilitasi kegiatan di bidang Perlindungan Hutan dan Usaha Kehutanan, meliputi

- a. Penyiapan rumusan kebijakan teknis Perlindungan Hutan, Penataan dan Pemanfaatan Hutan serta Peredaran Hasil Hutan.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis perlindungan hutan, penataan dan pemanfaatan serta peredaran hasil hutan.
- c. Penyusunan petunjuk pelaksanaan, petunjuk operasional dan petunjuk teknis perlindungan hutan, penataan dan pemanfaatan hutan serta peredaran hasil hutan.
- d. Pemberian bimbingan teknis perlindungan hutan, penataan dan pemanfaatan hutan serta peredaran hasil hutan.
- e. Pelaksanaan evaluasi perlindungan hutan, penataan dan pemanfaatan hutan serta peredaran hasil hutan.



- f. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan pemberian saran pertimbangan kepada atasan.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

#### 5. Bidang Budidaya dan Produksi Perkebunan

##### a. Tugas Pokok

Membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan, menghimpun, mengolah dan melaksanakan kegiatan dibidang Budidaya dan Produksi Perkebunan

##### b. Fungsi

Membantu mengkoordinasi dan atau memfasilitasi kegiatan di bidang Budidaya dan Produksi Perkebunan, meliputi :

- a. Penyiapan rumusan kebijakan teknis perbenihan, budidaya, perlindungan tanaman, pendataan dan pengembangan sumber daya perkebunan.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis perbenihan, budidaya, perlindungan tanaman, pendataan dan pengembangan sumber daya perkebunan.
- c. Penyusunan petunjuk pelaksanaan, petunjuk operasional dan petunjuk teknis perbenihan, budidaya, perlindungan tanaman, pendataan dan pengembangan sumber daya perkebunan.

- d. Pemberian bimbingan teknis perbenihan, budidaya perlindungan tanaman, pendataan dan pengembangan sumber daya perkebunan.
- e. Pelaksanaan evaluasi perbenihan, budidaya, perlindungan tanaman, pendataan dan pengembangan sumber daya perkebunan.
- f. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan pemberian saran pertimbangan kepada atasan.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

#### 6. Bidang Usaha dan Pengolahan Hasil Perhutanan

##### a. Tugas Pokok

Membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan, menghimpun, mengolah dan melaksanakan kegiatan di bidang Usaha dan Pengolahan Hasil Perhutanan

##### b. Fungsi

Membantu mengkoordinir dan atau memfasilitasi kegiatan di bidang Usaha dan Pengolahan Hasil Perhutanan, meliputi :

- a. Menyiapkan rumusan kebijakan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan, perizinan dan pembinaan usaha perkebunan serta sarana dan prasarana perkebunan.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.

- c. Penyusunan petunjuk pelaksanaan, petunjuk operasional dan petunjuk teknis pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan, perizinan dan pembinaan usaha perkebunan serta sarana dan prasarana perkebunan.
- d. Pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan, perizinan dan pembinaan usaha perkebunan serta sarana dan prasarana perkebunan.
- e. Pelaksanaan evaluasi pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan , perizinan dan pembinaan usaha perkebunan serta sarana dan prasarana perkebunan.
- f. Penyusunan laporan pelaksana tugas dan pemberian saran saran pertimbangan kepada atasan.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majene memiliki pegawai sebanyak 62 orang yang terdiri dari :

- Kepala (eselon II-B) : 1 Orang
- Sekretaris (eselon III-A) : 1 Orang
- Kepala Bidang (eselon III-B) : 4 Orang
- Kepala Sub Bagian/Seksi (eselon IV-A) : 15 Orang
- Staf (PNS) : 41 Orang

Berdasarkan tingkat Pendidikan, dapat diuraikan sebagai berikut :

- Pasca Sarjana (S2) : 3 Orang
- Sarjana (S1) : 14 Orang

- SLTA

: 45 Orang

## 2.2 Sumber Daya

Kabupaten Majene merupakan salah satu Kabupaten di Sulawesi Barat yang terletak di bagian tengah Pantai Barat memanjang dari selatan ke utara dengan jarak kurang lebih 302 Km dari Kota Makassar (Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan). Luas wilayahnya 94.784 Km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 15.107 jiwa dengan mata pencaharian ± 80% sebagai petani termasuk didalamnya usaha di bidang Kehutanan dan Perkebunan. Topografinya bergelombang sampai berbukit sehingga komoditi yang dikembangkan oleh petani didominasi tanaman-tanaman Kehutanan dan Perkebunan.

Luas kawasan hutan 52.071 Ha yang terdiri atas hutan lindung seluas kurang lebih 45.109 hektar dan hutan produksi terbatas seluas kurang lebih 6.690 hektar serta hutan rakyat seluas 19.000 Ha. Akibat deforestasi menyebabkan fungsi hutan lindung tidak dapat berfungsi optimal, walaupun demikian masih memiliki potensi untuk mengembangkan hasil hutan non kayu berupa rotan ± 5000 Ha di wilayah Kecamatan Tubo Sendana dan Ulumanda dan hutan kemasyarakatan seluas 1.900 Ha di Kecamatan Sendana sementara dalam kawasan hutan produksi terbatas telah dicanangkan 3.292 Ha untuk pengembangan HTR. Hutan yang merupakan milik masyarakat

dapat dikembangkan hutan rakyat seluas 19.000 Ha untuk tanaman kayu-kayuan dan pohon serba guna.

Kabupaten Majene merupakan salah satu daerah sentral komoditi perkebunan di Provinsi Sulawesi Barat dengan luas 29.891 Hektar dengan melibatkan 25.440 KK yang tersebar di Kecamatan Malunda, Ulumanda, Tubo Sendana, Tammeroddo Sendana, Sendana, Pamboang, Banggae dan Banggae Timur.

Jenis komoditi perkebunan yang dikembangkan meliputi kelapa dalam, kelapa hybrida, kopi robusta, kopi arabika, cengkeh, kakao, jambu mete, lada, pala, kemiri, kapuk, panili, aren, sagu dan jarak pagar dengan produksi 23.048 ton/tahun dengan produktifitas rata-rata 1,01 ton/ha,

Untuk meningkatkan produksi dan produktifitas, kegiatan yang diperlukan adalah kegiatan Peremajaan, Rehabilitasi, Intensifikasi dan perluasan areal. Berdasarkan kondisi pertanaman dengan potensi berbagai jenis lahan yang tersedia kegiatan peremajaan perlu dilakukan 200 Ha, direhabilitasi 400 Ha, intensifikasi 1130 Ha dan perluasan areal .....Ha.

### **2.3 Kinerja Pelayanan**

Kinerja pembanguna kehutanan berdasarkan Renstra tahun 2006-2011 antara lain peningkatan pengetahuan dengan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan hutan yang lestari melalui kegiatan Reboisasi, Penghijauan, Kegiatan Konservasi Hutan,

Pengamanan dan Perlindungan Hutan serta pembinaan dan pengetahuan penataan hasil hutan.

Dari 30.230 Ha lahan kritis selama 2006-2011 telah Rehabilitasi melalui kegiatan melalui kegiatan Reboisasi dalam kawasan hutan seluas 3.450 Ha dan penghijauan diluar kawasan hutan seluas 4.850 Ha serta kegiatan konservasi hutan lainnya seperti sumur resapan, pembuatan bangunan konservasi tanah dan lain-lain. Dalam rangka meningkatkan pengamanan dan perlindungan hutan dan hasil hutan telah ditugas polisi kehutanan sebanyak 24 orang untuk melakukan patroli rutin didalam dan disekitar hutan dan hasilnya tingkat perusakan hutan semakin menurun . disamping kegiatan tersebut, juga telah dilaksanakan pelatihan pengujian hasil hutan terhadap 20 orang kepala desa/kelurahan sebagai penerbit Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) yang merupakan dokumen pengangkutan kayu yang berasal dari hutan hak/tanah milik.

Disamping kegiatan-kegiatan tersebut, juga telah dikembangkan hasil hutan bukan kayu seperti Rotan seluas 50 Ha, Gaharu 16,8 Ha dan tanaman Murbei 12 Ha.

Pembangunan perkebunan selama periode 2006-2011 lebih banyak difokuskan pada peningkatan produksi, produktifitas dan mutu hasil perkebunan disamping kegiatan-kegiatan lain seperti penyediaan sarana dan prasarana pertanian serta peningkatan pengetahuan keterampilan petani dan salah satu komomiti yang jadi perhatian khusus selama periode tersebut adalah coklat. Dengan melalui

kegiatan Gernas, telah dilakukan peremajaan 200 Ha, Rehabilitasi 400 Ha dan Intensifikasi 1130 Ha dan telah mampu meningkatkan produksi dari 483 Ton pada tahun 2006 menjadi 7574 Ton pada tahun 2011. Dan berdasarkan upaya-upaya lain yang telah dilakukan telah dapat meningkatkan produksi kemiri dari 785 Ton pada tahun 2006 menjadi 2199 Ton pada tahun 2011 serta cengkeh 119 Ton tahun 2006 menjadi 256 Ton pada tahun 2011.

Peningkatan Sumber Daya Manusia khususnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam menciptakan good governance pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majene tertuang dalam Rencana Strategik tahun 2006-2011 dan rencana kerja tahunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majene sebagai dokumen perencanaan, yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Sistem Perencanaan Nasional.

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pada didasarkan kepada kompetensi yang dimiliki setiap aparatur yang diukur melalui tingkat pendidikan, keterampilan dan pengalaman kerja yang dimilikinya. Pendidikan dan pelatihan adalah yang paling efektif dalam melakukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur.

Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majene memiliki sumber daya manusia sebanyak 62 Orang pada akhir tahun 2011 yang meliputi pegawai struktural, fungsional dan staf serta petugas lapangan.

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam RPJMD tahun 2006-2011, telah dijabarkan dalam beberapa program dan kegiatan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Program tersebut adalah program Peningkatan Sumber daya Aparatur dengan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal. Pada Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal meliputi kursus singkat / pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis.

Pada kegiatan pelatihan, aparatur Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Majene telah mengikuti pelatihan teknis dan non teknis yang meliputi pelatihan dibidang pengelolaan administrasi umum, keuangan dan asset / barang serta pengelolaan sumber daya hutan dan kebun. Begitu pula sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya hutan dan kebun, penerapan perundang-undangan dan aplikasi pengelolaan keuangan daerah.

Ketiga hal tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada aparatur Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majene dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehingga visi dan misi yang emban dapat dicapai sesuai target kinerja yang ditetapkan. Hal ini merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dibidang peningkatan sumber daya aparatur, yang secara signifikan dapat mempengaruhi peningkatan kinerja aparatur



sebagai abdi negara dan abdi masyarakat melalui perencanaan yang matang.

Dengan kondisi aparatur tersebut di atas dapat berimplikasi terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majene.

Pada tahun 2011 kinerja pelayanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majene menunjukkan kinerja baik dengan realisasi penyerapan anggaran mencapai di atas 90 persen.

Dari beberapa sasaran yang telah tercapai tahun 2011, masih terdapat perbedaan dengan kondisi yang diharapkan oleh *stakeholders*. Hal ini terlihat dari indikator kinerja yang digunakan sebagian besar masih pada tingkat *output* atau keluaran dan hanya sebagian kecil yang dapat mencapai tingkat *outcome* atau hasil, itupun merupakan tingkat *outcome* pada tingkat terendah. Sedangkan idealnya sebagaimana yang diharapkan *stakeholders*, indikator kinerja sasaran mencapai pada tingkat *outcome*.

Hal itu disebabkan organisasi belum dapat secara tegas mendefinisikan indikator kinerja *outcome* atas seluruh kegiatan yang ada dan disesuaikan dengan kondisi nyata yang diharapkan. Selain itu analisis atas pencapaian indikator makro dan menghubungkannya dengan pencapaian indikator mikro belum dapat dilakukan karena analisis ini membutuhkan sumber daya manusia yang memadai serta

pembangunan infrastruktur atas sistem pengumpulan data yang didukung oleh sub sistem – sub sistem yang ada. Pada tahun-tahun mendatang diharapkan hal tersebut dapat dirumuskan dan dianalisis, sehingga dapat menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan *stakeholders*.

Pada Tahun 2011, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majene telah mencoba mengukur capaian kinerja untuk kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan anggaran berbasis kinerja.

Tabel 2.1  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan  
Kabupaten Majene Renstra (2006-2012)

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Terbentuknya KPH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	-	-	-	-
2	Tersedianya hutan tanaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 Ha	10 Ha	10 Ha	10 Ha	-	-	-	-	-
3	Berkembangnya hasil hutan non kayu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 Ha	25 Ha	25 Ha	25 Ha	-	-	-	-	-
4	Tersedianya penatausahaan hasil hutan	-	-	-	-	-	-	-	-	90%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
5	Terbitnya peredaran hasil hutan	-	-	-	-	-	-	-	-	90%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
6	Terkoordinasinya penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	-	-	-	-	-
7	Tersedianya bibit tanaman kayu-kayuan dan MPTS	-	-	-	-	-	-	-	-	4 Jenis	15 Jenis	15 Jenis	15 Jenis	15 Jenis	-	-	-	-	-
8	Terbina, terkendali dan terawasinya Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	-	-	-	-	-

9	Meningkatnya rehabilitasi hutan dan lahan	-	-	-	-	-	-	-	-	140 Ha	150 Ha	160 Ha	170 Ha	180 Ha	-	-	-	-	-
10	Berkurangnya kerusakan hutan	-	-	-	-	-	-	-	-	29.900 Ha	29.760 Ha	29.590 Ha	29.420 Ha	29.240 Ha	-	-	-	-	-
11	Terlaksananya Perlindungan Hutan	-	-	-	-	-	-	-	-	56%	65%	78%	85%	100%	-	-	-	-	-
12	Belum ada pembinaan industri hasil hutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	-	-	-	-	-
13	Bertambahnya luas areal tanaman perkebunan	-	-	-	-	-	-	-	-	50 Ha	50 Ha	50 Ha	50 Ha	v50 Ha	-	-	-	-	-
14	Tersedianya benih unggul produk perkebunan	-	-	-	-	-	-	-	-	Terpenuhiya benih komoditas kelapa, pala, kakao pada 8 KT	Terpenuhiya benih komoditas kelapa, pala, kakao pada 12 KT	Terpenuhiya benih komoditas kelapa, pala, kakao pada 16 KT	Terpenuhiya benih komoditas kelapa, pala, kakao pada 20 KT	Terpenuhiya benih komoditas kelapa, pala, kakao pada 16 KT	-	-	-	-	-
15	Tersedianya sistem informasi harga produk perkebunan dan terlaksananya peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	Tersedianya informasi harga pada 8 kecamatan	Tersedianya informasi harga pada 8 kecamatan	Tersedianya informasi harga pada 8 kecamatan	Tersedianya informasi harga pada 8 kecamatan	Tersedianya informasi harga pada 8 kecamatan	-	-	-	-	-
16	Meningkatnya produksi dan mutu produk perkebunan kakao dan kelapa	-	-	-	-	-	-	-	-	P=200 Ha, R=400 Ha, I=1130 Ha	P=600 Ha, R=200 Ha, I=1500 Ha	P=450 Ha, R= - Ha, I=1000 Ha	P=450 Ha, R= - Ha, I=1130 Ha	P=2200 Ha, R=600 Ha, I=5260 Ha	-	-	-	-	-

17	Berkembangnya mitra usaha bagi produk perkebunan	-	-	-	-	-	-	-	-	Diupayakan mitra usaha untuk 3 produk (kakao, kelapa, kemiri)	Diupayakan mitra usaha untuk 4 produk (kakao, kelapa, kemiri, cengkeh)	Diupayakan mitra usaha untuk 6 produk (kakao, kelapa, kemiri, pala, kopi)	Diupayakan mitra usaha untuk 6 produk (kakao, kelapa, kemiri, cengkeh, pala, kopi)	Diupayakan mitra usaha untuk 6 produk (kakao, kelapa, kemiri, cengkeh, pala, kopi)	-	-	-	-	-
18	Tersedianya sarana dan prasarana teknologi tepat guna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tersedianya sarana dan prasarana teknologi tepat guna 1 unit	Tersedianya sarana dan prasarana teknologi tepat guna 1 unit	Tersedianya sarana dan prasarana teknologi tepat guna 1 unit	Tersedianya sarana dan prasarana teknologi tepat guna 1 unit	-	-	-	-	-
19	Meningkatnya keterampilan penggunaan alat teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Terlatihnya petani 30 Orang	Terlatihnya petani 30 Orang	Terlatihnya petani 30 Orang	Terlatihnya petani 30 Orang	-	-	-	-	-
20	Meningkatnya penerapan teknologi pertanian/perkebunan	-	-	-	-	-	-	-	-	60%	70%	80%	90%	100%	-	-	-	-	-
21	Tersedianya sarana produksi untuk petani komoditi kelapa dan kakao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Terpenuhiy kebutuhan saprodi pertanian/perkebunan 10 KT	Terpenuhiy kebutuhan saprodi pertanian/perkebunan 10 KT	Terpenuhiy kebutuhan saprodi pertanian/perkebunan 20 KT	Terpenuhiy kebutuhan saprodi pertanian/perkebunan 60 KT	-	-	-	-	-

22	Meningkatnya produktivitas tanaman perkebunan (kakao)	-	-	-	-	-	-	-	-	Produktivitas tanaman kakao saat ini 900 Kg/ha	Produktivitas tanaman kakao saat ini 1050 Kg/ha	Produktivitas tanaman kakao saat ini 1200 Kg/ha	Produktivitas tanaman kakao saat ini 1400 Kg/ha	Produktivitas tanaman kakao saat ini 1500 Kg/ha	-	-	-	-	-
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**Tabel 2.2**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan**  
**Kabupaten Majene**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Terbentuknya KPH	-	-	-	-	-	-	-	150.000.000	165.000.000	181.500.000	199.650.000	696.150.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Tersedianya hutan tanaman	-	-	-	-	-	-	-	60.000.000	66.000.000	72.600.000	79.860.000	278.460.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Berkembangnya hasil hutan non kayu	-	-	-	-	-	-	-	150.000.000	165.000.000	181.500.000	199.650.000	696.150.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Tersedianya penatausahaan hasil hutan	-	-	-	-	-	-	24.420.000	26.862.000	29.584.000	32.503.000	35.753.000	149.122.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Terbitnya peredaran hasil hutan	-	-	-	-	-	-	11.200.000	12.320.000	13.552.000	14.907.000	16.398.000	68.377.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Terkoordinasinya penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan	-	-	-	-	-	-	-	27.500.000	30.250.000	33.275.000	36.602.500	127.627.500	-	-	-	-	-	-	-	-
Tersedianya bibit tanaman kayu-kayuan dan MPTS	-	-	-	-	-	-	53.000.000	200.000.000	220.000.000	242.000.000	266.200.000	981.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-

Terbina, terkendali dan terawasinya Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	-	-	-	-	-	-	-	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningkatnya rehabilitasi hutan dan lahan	-	-	-	-	-	-	1.428.000.000	1.570.000.000	2.500.000.000	3.000.000.000	3.500.000.000	11.998.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Berkurangnya luas lahan kritis yang direboisasi	-	-	-	-	-	-	1.240.000.000	1.650.000.000	1.750.000.000	1.900.000.000	2.000.000.000	8.540.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Berkurangnya kerusakan hutan	-	-	-	-	-	-	50.000.000	55.000.000	60.500.000	66.550.000	73.205.000	305.255.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Terlaksananya Perlindungan Hutan	-	-	-	-	-	-	128.130.000	140.943.000	155.037.000	170.541.000	187.595.000	782.246.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum ada pembinaan industri hasil hutan	-	-	-	-	-	-	-	50.000.000	55.000.000	60.500.000	66.550.000	232.050.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Bertambahnya areal tanaman perkebunan	-	-	-	-	-	-	-	375.000.000	375.000.000	375.000.000	375.000.000	1.500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan serta penerapan teknologi perkebunan	-	-	-	-	-	-	-	60.000.000	60.000.000	90.000.000	120.000.000	330.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Tersedianya benih unggul produk perkebunan	-	-	-	-	-	-	31.470.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	231.470.000	-	-	-	-	-	-	-	-



Tersedianya sistem informasi harga produk perkebunan dan terlaksananya peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi	-	-	-	-	-	-	20.000.000	45.000.000	50.000.000	50.000.000	80.000.000	245.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningkatnya produksi dan mutu produk perkebunan kakao dan kelapa	-	-	-	-	-	-	115.800.000	675.000.000	550.000.000	570.000.000	575.000.000	2.485.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Berkembangnya mitra usaha bagi produk perkebunan	-	-	-	-	-	-	20.000.000	45.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	215.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Tersedianya sarana dan prasarana teknologi tepat guna	-	-	-	-	-	-	-	175.000.000	175.000.000	175.000.000	120.000.000	645.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningkatnya keterampilan penggunaan alat teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	-	-	-	-	-	-	-	33.000.000	36.000.000	39.000.000	42.000.000	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningkatnya penerapan teknologi pertanian/perkebunan	-	-	-	-	-	-	20.180.000	25.000.000	30.000.000	35.000.000	40.000.000	150.180.000	-	-	-	-	-	-	-	-

Tersedianya sarana produksi untuk petani komoditas kelapa dan kakao	-	-	-	-	-	-	-	35.000.000	35.000.000	70.000.000	70.000.000	210.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Meningkatnya produktivitas tanaman perkebunan (Kakao)	-	-	-	-	-	-	20.000.000	50.000.000	70.000.000	80.000.000	100.000.000	320.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan**

Dalam pengembangan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majene tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan adalah masih luasnya lahan kritis, masih maraknya perambahan hutan akibat aktifitas masyarakat melakukan perladangan berpindah, masyarakat melakukan aktifitas dalam kawasan hutan seperti pemukiman dan perkebunan, tingginya kesenjangan antara produksi perkebunan dan potensi yang dimiliki, masih terbatasnya infrastruktur pendukung berupa jalan produksi dan pemasaran, menurunnya produktifitas akibat perubahan iklim dan serangan hama penyakit tanaman perkebunan dan belum optimalnya penanganan pasca panen.

Sedangkan peluang untuk peningkatan pelayanan dibidang kehutanan dan perkebunan yang dapat dikembangkan adalah luas kawasan hutan dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal dengan pengembangan berbagai program yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi lahan perkebunan yang dimiliki sangat memungkinkan pengembangan komoditi perkebunan yang lebih besar dengan peningkatan produksi dan produktifitas tanaman perkebunan.

## **BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan**

#### **a. Urusan Kehutanan**

1. Pengelolaan kawasan hutan belum baik
2. Penurunan fungsi hutan dan lahan
3. Pengembangan investasi industri hasil hutan belum optimal
4. Masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan petani
5. Terjadinya perambahan hutan akibat aktifitas ladang berpindah masyarakat
6. Masih terdapatnya permukiman masyarakat pada kawasan hutan lindung

#### **b. Urusan Perkebunan**

1. Adanya kesenjangan antara produksi perkebunan dengan potensi yang dimiliki
2. Masih terbatasnya infrastruktur pendukung berupa jalan produksi dan perbaikan jalan desa untuk kepentingan produksi dan pemasaran
3. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan lahan khususnya lahan kebun
4. Penurunan produktifitas akibat perubahan iklim dan serangan hama penyakit tanaman
5. Belum optimalnya penanganan pasca panen

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majene mendukung pencapaian misi dan sasaran pembangunan Bupati Majene sebagai berikut:

1. Misi 5 Sasaran 1 : Meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan hasil SDA yang terkendali
2. Misi 5 sasaran 2 : Berkurangnya kasus perambahan hutan
3. Misi 5 Sasaran 3 : Meningkatnya penanganan terhadap lahan kritis
4. Misi 5 Sasaran 5 : Meningkatnya fungsi kawasan lindung dan daerah hijau
5. Misi 5 Sasaran 6 : Terselenggaranya perlindungan dan konservasi sumber daya alam
6. Misi 6 Sasaran 4 : Optimalisasi potensi dan pencapaian target pendapatan daerah
7. Misi 8 Sasaran 1 : Optimalisasi peningkatan kualitas produksi SDA dalam mendukung perekonomian daerah
8. Misi 8 Sasaran 3 : Tersedianya komoditas unggulan daerah yang berdaya saing
9. Misi 8 Sasaran 5 : Terwujudnya ketahanan pangan daerah

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Guna tetap menjaga serta meningkatkan keberlanjutan pembangunan kehutanan, dalam 5 (lima) tahun kedepan Kementerian Kehutanan menetapkan 6 (enam) prioritas: (1) Pemantapan Kawasan Hutan; (2) Rehabilitasi Hutan dan Peningkatan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS); (3) Pengamanan Hutan dan Pengendalian kebakaran Hutan; (4) Konservasi Keanekaragaman Hayati; (5) Revitalisasi Pemanfaatan

Hutan dan Industri Kehutanan; (6) Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Hutan.

Untuk mengimplementasikan kebijakan prioritas pembangunan kehutanan di atas, maka dalam Tahun 2010-2014 Kementerian Kehutanan akan melaksanakan 8 program. Adapun outcome dan indikator kinerja utama setiap program adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemanfaatan

Kawasan Hutan, outcome dari program ini adalah terjaminnya kepastian kawasan hutan sehingga pengelolaan sumberdaya hutan dapat dilaksanakan secara lebih optimal. Kondisi ini antara lain sebagai prakondisi dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari, serta secara tidak langsung menjadi bagian dalam penanganan terhadap isu-isu perubahan iklim. Program ini memiliki indikator kinerja utama antara lain: (1) Data dan informasi geospasial dasar dan tematik kehutanan terkini tingkat nasional sebanyak 5 judul, (2) Ijin pinjam pakai kawasan hutan terlayani 100% secara tepat waktu, (3) Rencana makro kehutanan tentang perlindungan dan konservasi sumberdaya alam, pemanfaatan, rehabilitasi hutan dan lahan dan penataan ruang sebanyak 4 judul, (4) Tata batas kawasan hutan sepanjang 25.000 Km, terdiri dari batas luar dan batas fungsi kawasan hutan, (5) Penunjukkan kawasan hutan provinsi selesai 100%, (6) Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan ditetapkan di

setiap provinsi dan beroperasinya 120 KPH (20% wilayah KPH yang telah ditetapkan).

- b. Program Peningkatan Usaha Kehutanan, outcome dari program ini adalah peningkatan investasi usaha pemanfaatan hutan produksi dan daya saing industri primer hasil hutan, serta peningkatan produksi dan diversifikasi hasil hutan. Program ini memiliki indikator kinerja utama: (1) Areal hutan produksi tertata dalam unit-unit pengelolaan berupa KPHP di 18 provinsi dan usaha pemanfaatan (ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu-hutan alam/hutan tanaman/ IUPHHKHA/HT, IUPHH bukan kayu/IUPHH restorasi ekosistem/IUPHH jasa lingkungan/pemanfaatan kawasan) di 26 provinsi; (2) Produksi dan diversifikasi usaha pemanfaatan pada hutan alam produksi meningkat sebesar 5%, terdiri dari hasil hutan kayu, bukan kayu, jasa lingkungan, dan restorasi ekosistem; (3) Penerbitan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam dan atau Restorasi Ekosistem (IUPHHK—HA/RE) pada areal bekas tebangan (logged over area/LOA) seluas 2,5 juta ha; (4) Kinerja usaha pemanfaatan hutan tanaman dan intensitas pemanfaatan hutan produksi meningkat (penambahan tanaman pada hutan tanaman seluas 2.650.000 ha); (5) Penatausahaan hasil hutan dan iurankehutanan berjalan secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) meningkat

10%; (6) Kinerja industri pengolahan hasil hutan meningkat (50% produk bersertifikat legalitas kayu).

- c. Program konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan. Program ini memiliki outcome yaitu biodiversity dan ekosistemnya berperan signifikan sebagai penyangga ketahanan ekologis dan penggerak ekonomi riil serta pengungkit martabat bangsa dalam pergaulan global. Indikator kinerja utamanya adalah: (1) Terbangunnya sistem pengelolaan di 12 BLU di UPT PHKA; (2) Konflik dan tekanan terhadap kawasan TN dan KK lainnya (CA, SM, TB) dan HL menurun sebanyak 5%; (3) Populasi spesies prioritas utama yang terancam punah meningkat sebesar 3% dari kondisi Tahun 2008 sesuai ketersediaan habitat; (4) Kasus baru tindak pidana kehutanan (logging, perambahan, perdagangan tumbuhan dan satwa liar ilegal, penambangan ilegal dan kebakaran hutan) penanganannya terselesaikan minimal 75%; (5) Hotspot (titik api) di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi berkurang 20% setiap tahun; (5) Meningkatnya pengusaha pariwisata alam sebesar 6% dibanding Tahun 2009.
- d. Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, yang memiliki outcome berkurangnya lahan kritis pada DAS Prioritas. Indikator kinerja utama dari program ini adalah: (1) Tanaman rehabilitasi hutan dan lahan kritis termasuk hutan mangrove,



gambut, dan rawa pada DAS Prioritas seluas 2,5 juta ha; (2) Terbangunnya hutan kemasyarakatan (HKm) seluas 2 juta ha; (3) Terbangunnya hutan rakyat kemitraan seluas 250.000 ha; (4) Terbangunnya sumber benih baru seluas 6.000 ha, pengelolaan areal sumber benih yang telah ada seluas 4.500 ha; (5) Terbangunnya hutan desa seluas 500.000 ha; (6) Rencana pengelolaan DAS terpadu sebanyak 108 unit DAS prioritas.

- e. Program penyuluhan dan pengembangan SDM kehutanan. Outcome dari program ini adalah meningkatnya kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha melalui upaya penyuluhan, serta peningkatan kapasitas aparatur Kemenhut dan SDM kehutanan lainnya. Indikator kinerja utama dari program ini adalah: (1) Terbentuknya 50 kerjasama kemitraan dalam rangka peningkatan peran serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat; (2) Terbentuknya 500 kelompok masyarakat produktif mandiri; (3) Sertifikasi penyuluh kehutanan sebanyak 1.500 orang; (4) Pendidikan dan pelatihan aparatur Kemenhut dan SDM kehutanan lainnya sebanyak 15.000 orang peserta; (5) Pendidikan menengah kehutanan sebanyak 1.440 orang.
- f. Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kehutanan, yang memiliki target outcome minimal 60% hasil penelitian dan pengembangan kehutanan dapat dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan, pengelolaan teknis kehutanan dan

pengayaan ilmu pengetahuan, termasuk pengembangan kebijakan dan teknis yang berkaitan dengan isu-isu perubahan iklim. Indikator kinerja utama dari program ini adalah: (1) IPTEK dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna untuk bidang hutan alam, biodiversitas dan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) sebanyak 7 paket; (2) IPTEK dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna bidang hutan tanaman dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) sebanyak 6 paket IPTEK; (3) IPTEK dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna bidang keteknikan hutan dan pengolahan hasil hutan sebanyak 5 paket IPTEK; (4) IPTEK dasar dan terapan yang dimanfaatkan oleh pengguna pada bidang lansekap hutan, perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sebanyak 7 paket IPTEK.

- g. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kehutanan, outcome dari program ini adalah terwujudnya pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian Kehutanan, serta mendorong perwujudan reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Kehutanan. Indikator kinerja utama dari program ini adalah: (1) Kelemahan administrasi diturunkan sampai 50% dari Tahun 2009; (2) Pelanggaran terhadap peraturan perundangan berkurang sampai 50% dari Tahun 2009; (3) Hambatan kelancaran pelaksanaan tugas berkurang hingga 50% dari Tahun 2009; dan (4) Potensi

kerugian negara dapat diturunkan hingga 25% dari temuan Tahun 2006-2009.

- h. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan, dengan outcome adalah meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan Kemenhut secara efektif dan efisien. Indikator Kinerja Utama dari program ini adalah : (1) Opini laporan keuangan Kemenhut tahunan “wajar tanpa pengecualian” mulai laporan keuangan Tahun 2011 sebanyak 1 judul per Tahun; (2) Pengembalian pinjaman/piutang sebanyak 69 unit perusahaan terselesaikan sebesar 80%; (3) Pencapaian sasaran strategis minimal 95% di akhir Tahun 2014; (4) Terselesaikannya status pencatatan BMN eks kantor Wilayah Kementerian Kehutanan di 15 provinsi; (5) Penanganan perkara, pemulihan hak-hak negara bidang kehutanan minimal menang 80% di akhir Tahun 2014; (6) Prasarat pengembangan kapasitas dan karir pegawai minimal terpenuhi 95%; (7) Meningkatnya citra positif Kemenhut sebesar 10% per tahun; (8) Standar produk dan jasa kehutanan, pedoman pengelolaan lingkungan dan perubahan iklim 35 judul; (9) Kerjasama baru bilateral sebanyak 5 negara dan multipihak sebanyak 3 lembaga; (10) Tersusunnya perencanaan kehutanan 4 regional; (11) Penyaluran kredit pembangunan hutan tanaman industri (HTI), hutan tanaman rakyat (HTR) dan hutan rakyat (HR) seluas 400.000 ha.

Sedangkan program pembangunan perkebunan tahun 2010 – 2014 adalah “Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan”.

Program ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan melalui rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang didukung oleh penyediaan benih bermutu, sarana produksi, perlindungan perkebunan dan penanganan gangguan usaha secara optimal.

Prioritas penanganan difokuskan pada 15 komoditas strategis yang menjadi unggulan nasional yaitu karet, kelapa sawit, kelapa, kakao, kopi, lada, jambu mete, teh, cengkeh, jarak pagar, kemiri sunan, tebu, kapas, tembakau, dan nilam. Sedangkan Pemda didorong untuk memfasilitasi dan melakukan pembinaan komoditas spesifik dan potensial di wilayahnya masing-masing.

Sebagai penjabaran dari program, terdapat kegiatan pembangunan perkebunan, yakni:

1. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman semusim
2. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman rempah dan penyegar
3. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman tahunan
4. Dukungan penyediaan benih unggul bermutu dan sarana produksi
5. Dukungan perlindungan perkebunan dan penanganan gangguan usaha

6. Dukungan pengujian, pengawasan mutu benih dan penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan BBP2TP Medan
7. Dukungan pengujian, pengawasan mutu benih dan penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan BBP2TP Surabaya
8. Dukungan pengujian, pengawasan mutu benih dan penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan BBP2TP Ambon

Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman semusim dimaksudkan untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu tanaman semusim melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang didukung oleh penyediaan benih bermutu, sarana produksi, perlindungan perkebunan dan penanganan gangguan usaha serta pelayanan organisasi secara optimal.

Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman rempah dan penyegar dimaksudkan untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu tanaman rempah dan penyegar melalui intensifikasi, ekstensifikasi, rehabilitasi dan diversifikasi yang didukung oleh penyediaan benih bermutu, sarana produksi, perlindungan perkebunan dan penanganan gangguan usaha serta pelayanan organisasi secara optimal.

Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman tahunan dimaksudkan untuk meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu tanaman tahunan dimaksudkan melalui intensifikasi, ekstensifikasi, rehabilitasi dan diversifikasi yang didukung oleh penyediaan benih bermutu, sarana produksi, perlindungan

perkebunan dan penanganan gangguan usaha serta pelayanan organisasi secara optimal.

Dukungan penyediaan benih unggul bermutu dan sarana produksi dimaksudkan untuk memfasilitasi penyediaan benih unggul bermutu dan sarana produksi serta penguatan kelembagaan perbenihan dan sarana produksi perkebunan.

Dukungan perlindungan perkebunan dan penanganan gangguan usaha dimaksudkan untuk memfasilitasi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dan penanganan gangguan usaha perkebunan (GUP).

Prioritas kegiatan ini adalah menurunkan luas serangan OPT, pelatihan petani melalui sekolah lapang pengendalian hama terpadu (SL-PHT), penurunan titik api kebakaran lahan dan kebun, penanganan gangguan usaha perkebunan, adaptasi dan mengitiasi perubahan iklim.

Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya dimaksudkan untuk memfasilitasi dan memberikan dukungan pelayanan organisasi yang berkualitas.

Prioritas kegiatan ini adalah memfasilitasi pelayanan perencanaan program, anggaran dan kerjasama yang berkualitas; pelayanan administrasi keuangan dan aset yang berkualitas, pelayanan organisasi, tata laksana kepegawaian, humas, hukum dan administrasi perkantoran yang berkualitas; dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data informasi yang berkualitas.

Dukungan pengujian, pengawasan mutu benih dan penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan BBP2TP Medan dimaksudkan untuk memfasilitasi terlaksananya pengawasan dan pengujian mutu benih, penerapan teknologi proteksi tanaman dan memberikan dukungan pelayanan organisasi yang berkualitas sebagai rujukan UPTD.

Prioritas dukungan ini adalah memfasilitasi pelayanan sertifikasi benih dan peningkatan jumlah teknologi terapan perlindungan perkebunan.

Dukungan pengujian, pengawasan mutu benih dan penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan BBP2TP Surabaya dimaksudkan untuk memfasilitasi terlaksananya pengawasan dan ujian mutu benih, penerapan teknologi proteksi tanaman dan memberikan dukungan pelayanan organisasi yang berkualitas sebagai rujukan UPTD.

Prioritas kegiatan ini adalah memfasilitasi pelayanan sertifikasi benih dan peningkatan jumlah teknologi terapan perlindungan perkebunan.

Dukungan pengujian, pengawasan mutu benih dan penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan BBP2TP Ambon dimaksudkan untuk memfasilitasi terlaksananya pengawasan dan ujian mutu benih, penerapan teknologi proteksi tanaman dan memberikan dukungan pelayanan organisasi yang berkualitas sebagai rujukan UPTD.

Prioritas kegiatan ini adalah memfasilitasi pelayanan sertifikasi benih dan peningkatan jumlah teknologi terapan perlindungan perkebunan.

Renstra Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majene telah mendukung Renstra Kementerian Kehutanan melalui program rehabilitasi hutan dan lahan dalam rangka mensukseskan program nasional penanaman satu milyar pohon yang pencanangannya telah dilaksanakan oleh Presiden RI pada tanggal 28 Nopember 2008 di Cibinong, Kabupaten Bogor bersamaan dengan penetapan tanggal 28 Nopember sebagai Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Desember sebagai Bulan Menanam Nasional.

Pada Penganangan Hari menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional tanggal 28 Nopember 2008 tersebut Presiden RI mengamanatkan bahwa pada setiap tahun agar dilaksanakan Gerakan Menanam Satu Orang Satu Pohon (One Man One Tree), yaitu gerakan penanaman pohon seluruh penduduk Indonesia untuk menanam minimal satu orang satu pohon dengan target 1 milyar pohon yang harus ditanam.

Pada sektor Perkebunan telah dicanangkan Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao (Gernas Kakao) sebagai upaya percepatan peningkatan produktivitas dan mutu hasil kakao nasional melalui pemberdayaan secara optimal seluruh pemangku kepentingan serta sumber daya yang tersedia.



Gerakan ini mulai tahun 2009 pada 9 provinsi 40 kabupaten dan pada tahun 2012 ini, Gernas kakao dilaksanakan di 14 provinsi dan 50 kabupaten. Pertanaman kakao di wilayah tersebut pada umumnya kondisi tanamannya sudah tua/rusak dan kurang terawat, terserang hama dan penyakit dengan tingkat serangan sedang sampai berat, sehingga memerlukan upaya perbaikan secara menyeluruh agar produktivitas dan mutu dapat ditingkatkan.

Sasaran Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao meliputi perbaikan tanaman kakao rakyat seluas 450.000 ha melalui peremajaan, rehabilitasi, intensifikasi, pemberdayaan petani, pengendalian hama dan penyakit, perbaikan mutu kakao, serta penyediaan sarana pendukung lainnya. Khusus di kabupaten Majene tanaman kakao yang akan diremajakan seluas 200 ha, rehabilitasi 400 ha dan intensifikasi 1130 ha.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;

- b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai matra keruangan dari pembangunan daerah;
- b. Sebagai dasar kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Majene;
- c. Sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan perkembangan antara wilayah Kabupaten Majene, dan antar kawasan serta keserasian antar sektor;
- d. Sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang;
- e. Sebagai alat untuk mengalokasikan investasi yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta;
- f. Sebagai pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan dalam lingkup Kabupaten Majene.

Kegunaan Rencana Tata Ruang Wilayah adalah:

- a. Terkendalinya pembangunan di wilayah kabupaten baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat;
- b. Terciptanya keserasian antara kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- c. Tersusunnya rencana dan program-program pembangunan;
- d. Terdongginya minat investasi masyarakat dan dunia usaha;

- e. Terkoordinasinya pembangunan antar wilayah dan antar sektor pembangunan.

Dari uraian tersebut di atas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pada sektor kehutanan dan perkebunan penyusunan RTRW sangat diperlukan dalam rangka penataan kluster-kluster pembangunan khususnya disektor kehutanan dan perkebunan. Pada sektor kehutanan terkait dengan luas kawasan hutan.

Rencana pola ruang terdiri dari rencana pola ruang kawasan lindung dan rencana pola ruang kawasan budidaya. Rencana pola ruang kawasan lindung termasuk kawasan konservasi laut meliputi alokasi ruang, yang terdiri atas:

- a. Kawasan Hutan Lindung seluas 45.288 ha, dengan luas (dalam ha) pada di masing-masing kecamatan sebagai berikut:

Banggae Timur	:	83	ha
Pamboang	:	1.895	ha
Sendana	:	6.569	ha
Tammerodo	:	3.976	ha
Tubo Sendana	:	4.443	ha
Malunda	:	13.231	ha
Ulumanda	:	15.091	ha

Rencana pola ruang kawasan lindung untuk pengamanan kawasan rawan bencana di Kabupaten Majene terdiri dari:

- a. Kawasan bencana longsor di sepanjang jalan utama terutama pada daerah dengan konsentrasi permukiman yang berada di tengah dan kaki perbukitan.
- b. Bencana banjir dapat terjadi di semua daerah dataran rendah di Kabupaten Majene.
- c. Kawasan rawan gempa berada di Kecamatan Sendana, Kecamatan Tammerodo Sendana dan Kecamatan Ulumanda
- d. Kawasan rawan bencana Tsunami di sepanjang pantai Kabupaten Majene.
- e. Kawasan rawan kebakaran di Kecamatan Banggae, Kecamatan Bangga Timur, Kecamatan Pamboang dan Kecamatan Sendana.

Dalam rangka rencana pemantapan kawasan hutan lindung, maka direncanakan:

- a. Rekonstruksi tata batas kawasan hutan lindung untuk memperoleh kepastian hukum yang mengikat seluruh stakeholder terkait, dan partisipasi masyarakat lokal dalam penetapan batas sangat penting untuk menghindari berbagai bentuk konflik di kemudian hari.
- b. Pengelolaan hutan lindung harus mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas lingkungan, peningkatan kekayaan keaneka ragaman hayati, penyediaan hasil hutan bukan kayu, pengembangan ekoturisme, peningkatan pendapatan masyarakat lokal dan penguatan partisipasi masyarakat.

- c. Pengelolaan hutan lindung harus dikembangkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti luas kawasan, potensi, derajat besarnya gangguan (illegal logging, perambahan); kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat lokal; karakteristik spatial, aksesibilitas serta kondisi sumberdaya di luar hutan lindung.
- d. Pengelolaan hutan lindung merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan DAS secara terpadu dan harus selaras dengan aktivitas pengembangan sektor-sektor lain serta menerapkan prinsip peranan hulu-hilir yang berkeadilan.
- e. Sistem pengamanan dan perlindungan hutan harus merupakan sistem partisipatif yang melibatkan petugas pemerintah dan masyarakat lokal.

Rencana pola ruang kawasan budidaya kehutanan yang ada di Kabupaten Majene adalah kawasan hutan produksi terbatas yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan secara terbatas.

Kawasan hutan produksi terbatas di Kabupaten Majene adalah seluas 7.418 ha terbagi sebagai berikut:

- Kecamatan Malunda 5.222 ha
- Kecamatan Ulumanda 2.195 ha

Rencana pemanfaatan budidaya kehutanan dengan peruntukan hutan produksi adalah:

- a. Pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
- b. Pemanfaatan kawasan dilaksanakan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi yang optimal.
- c. Pemanfaatan jasa lingkungan dilakukan dalam bentuk usaha yang memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
- d. Pemanfaatan hasil hutan dilakukan dalam bentuk usaha pemanfaatan hutan alam dan usaha pemanfaatan hutan tanaman. Usaha pemanfaatan hutan tanaman diutamakan dilaksanakan pada hutan yang tidak produktif dalam rangka mempertahankan hutan alam.
- e. Pemungutan hasil hutan meliputi pemanenan, penyaradan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran yang diberikan untuk jangka waktu tertentu.

Kawasan budidaya pertanian salah satunya adalah kawasan budidaya pertanian lahan kering tanaman tahunan (perkebunan). Kawasan budidaya pertanian lahan kering tanaman tahunan dan perkebunan dikembangkan untuk tanaman pengembangan tanaman tahunan dan perkebunan di Kecamatan

Banggae	:	1.617	Ha
Banggae Timur	:	1.968	Ha
Malunda	:	2.895	Ha
Pamboang	:	5.043	Ha
Sendana	:	3.208	Ha
Tammerodo	:	3.320	Ha
Tubo Sendana	:	1.272	Ha
Ulumanda	:	15.570	Ha

Jenis tanaman tahunan dan perkebunan dapat berupa kakao, kelapa dalam, kelapa sawit, kopi, cengkeh, pala. Tanaman tahunan dan perkebunan dikembangkan sesuai dengan kesesuaian lahan dan kemampuan lahan, dengan memperhatikan komoditas unggulan wilayah dan komoditas yang diusahakan oleh masyarakat.

Pengembangan kawasan tanaman tahunan dan perkebunan perlu dilakukan melalui:

- a. Peningkatan kerjasama dan jejaring antara masyarakat (kelompok), antara masyarakat dan perusahaan perkebunan, untuk menciptakan sinergi usaha dan peningkatan produktivitas.
- b. Pengembangan sumberdaya manusia perkebunan, baik petani pekebun maupun pelaku usaha lainnya untuk menumbuhkan inovasi dan adaptasi guna berkembangnya sistem usaha agribisnis berbasis perkebunan.

- c. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang efektivitas sistem agribisnis tanaman perkebunan.
- d. Peningkatan pengelolaan dan pemantapan kawasan-kawasan konservasi sekitar kawasan tanaman perkebunan, untuk menghindari meningkatnya resiko banjir terutama pada wilayah-wilayah hulu daerah aliran sungai.
- e. Peningkatan ketersediaan informasi mengenai tanaman tahunan dan perkebunan, khususnya kakao.

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Permasalahan pembangunan adalah selisih antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil pada saat perencanaan di buat. Potensi permasalahan pembangunan sektor kehutanan dan perkebunan pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum dioptimalkan, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi. Berdasarkan hal tersebut di atas maka identifikasi permasalahan pembangunan sektor kehutanan dan perkebunan diuraikan sebagai berikut:

#### **A. Urusan Kehutanan**

1. Pengelolaan kawasan hutan belum baik
2. Penurunan fungsi hutan dan lahan
3. Pengembangan investasi industri hasil hutan belum optimal
4. Masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan petani
5. Terjadinya perambahan hutan akibat aktifitas ladang berpindah masyarakat



6. Masih terdapatnya permukiman masyarakat dalam kawasan hutan lindung.

#### B. Urusan Perkebunan

1. Adanya kesenjangan antara produksi perkebunan dengan potensi yang dimiliki
2. Tingginya alih fungsi lahan perkebunan yang mengakibatkan turunnya kuantitas produksi
3. Masih terbatasnya infrastruktur pendukung berupa jalan produksi dan perbaikan jalan desa untuk kepentingan produksi dan pemasaran
4. Penurunan produktifitas akibat perubahan iklim dan serangan hama penyakit tanaman perkebunan
5. Belum optimalnya penanganan pasca panen.

Dari beberapa permasalahan tersebut di atas yang telah diidentifikasi, maka isu strategis yang dapat diambil pada urusan kehutanan dan perkebunan adalah sebagai berikut:

#### 1. *Pembangunan Berkelanjutan;*

Kabupaten Majene ke depan, diharapkan tetap menjadi daerah hijau dan lestari yang bermanfaat bagi umat manusia di manapun. Lingkungan yang nyaman dan bermanfaat menjadi acuan dalam pembangunan Kabupaten Majene ke depan. Ke depan, pembangunan dilakukan dengan mensejajarkan antara pemanfaatan sumber daya alam dengan kebutuhan riil manusia serta kemampuan untuk menopangnya dalam jangka panjang.

Pemenuhan kesejahteraan umat manusia (masyarakat) diusahakan dicapai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan untuk masa depan.

## 2. *Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam*

Optimalisasi pengelolaan Sumber Daya Alam memiliki peran ganda yaitu sebagai modal pembangunan dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Pengelolaan sumber daya alam tersebut masih berkelanjutan dan relatif mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumber daya juga terjadi karena kemampuan iptek yang rendah sehingga tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk.

Bertambahnya kebutuhan lahan pertanian dengan menggunakan lahan hutan akan mengancam keberadaan hutan dan terganggunya keseimbangan tata air. Memburuknya kondisi hutan akibat perladangan yang berpindah-pindah dan memburuknya penutupan lahan di wilayah hulu daerah aliran sungai menyebabkan menurunnya ketersediaan air yang mengancam turunnya debit air dan sungai pada musim kemarau serta berkurangnya pasokan air untuk pertanian.

Optimalisasi pemanfaatan sumber daya air diarahkan untuk menjamin keberlanjutan daya dukungnya dengan menjaga kelestarian fungsi daerah tangkapan air dan keberadaan air tanah, mewujudkan keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan

melalui pendekatan demand management yang ditujukan untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi penggunaan dan konsumsi air dan pendekatan supply management yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan keandalan pasokan air, serta memperkokoh kelembagaan sumber daya air untuk meningkatkan keterpaduan dan kualitas terhadap masyarakat.

## **BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

### **4.1 Visi dan Misi**

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif, visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, visi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majene dijabarkan sebagai berikut :

*“TERWUJUDNYA PEMANFAATAN HUTAN DAN KEBUN MELALUI KEMANDIRIAN PETANI DAN PELAKU AGRIBISNIS SECARA OPTIMAL MELALUI PEMBANGUNAN SISTEM DAN USAHA YANG BERKELANJUTAN, BERDAYA SAING DAN BERKERAKYATAN SERTA OPTIMALISASI PENGELOLAAN AGRO EKOSISTEM”*

Visi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majene tersebut memuat makna dalam jangka waktu lima tahun pembangunan sektor kehutanan dan perkebunan akan mewujudkan pemanfaatan hutan dan kebun melalui kemandirian petani dan pelaku agribisnis secara optimal melalui pembangunan sistem dan usaha yang berkelanjutan, berdaya saing dan berkerakyatan serta optimalisasi pengelolaan agro ekosistem.

Untuk memenuhi visi tersebut, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majene mencanangkan misi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Pembangunan Berkelanjutan
2. Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam

#### **4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majene**

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, diperlukan adanya kerangka yang jelas pada setiap misi, menyangkut tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan, akan memberikan arah bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan terkait aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, maupun aspek daya saing daerah. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan misi dapat dilihat pada Tabel berikut:

No	Misi	Tujuan	Sasaran
1.	2	3	4
1.	Peningkatan SDM Masyarakat dan Aparatur Pemerintah	Meningkatkan kualitas SDM Masyarakat dan Aparatur Pemerintah	Meningkatnya keterampilan dan profesionalisme kerja masyarakat
2.	Penyelenggaraan Pembangunan Berkelanjutan	Menciptakan lingkungan yang serasi dan seimbang melalui pemanfaatan, pengelolaan dan pelestarian Sumber Daya Alam	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkurangnya kasus perambahan hutan</li> <li>2. Meningkatnya penanganan terhadap lahan kritis</li> <li>3. Meningkatnya fungsi kawasan</li> </ol>

			<p>lindung dan daerah hijau</p> <p>4. Terselenggaranya perlindungan dan konservasi sumber daya alam</p> <p>5. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan</p>
3.	Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang bertanggung jawab	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, demokratis, bersih, efektif dan efisien	Optimalisasi potensi dan pencapaian target PAD
4.	Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam	Optimalisasi pemanfaatan, pengelolaan dan peningkatan produksi hasil kehutanan dan perkebunan sebagai salah satu upaya menurunkan kemiskinan	<p>1. Optimalisasi peningkatan kualitas dan kuantitas produksi SDA dalam mendukung perekonomian daerah</p> <p>2. Terlaksananya proses nilai tambah produk</p> <p>3. Tersedianya komoditas unggulan daerah yang berdaya saing</p> <p>4. Tersedianya jaringan pemasaran produk</p>

			perkebunan 5. Terwujudnya ketahanan pangan daerah 6. Penerapan teknologi tepat guna dalam pemanfaatan seluruh hasil perkebunan secara komprehensif
--	--	--	--

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majene disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 4.1  
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majene

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan kualitas SDM masyarakat dan aparatur pemerintah	Meningkatkan keterampilan dan profesionalisme kerja masyarakat						
2.	Menciptakan lingkungan yang serasi dan seimbang melalui pemanfaatan, pengelolaan dan pelestarian SDA	Pemanfaatan dan pengelolaan hasil SDA yang terkendali	Terbentuknya KPH	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
		Pemanfaatan dan pengelolaan hasil SDA yang terkendali	Tersedianya hutan tanaman	-	10 Ha	10 Ha	10 Ha	10 Ha

		Pemanfaatan dan pengelolaan hasil SDA yang terkendali	Berkembangnya hasil hutan non kayu	-	25 Ha	25 Ha	25 Ha	25 Ha
		Pemanfaatan dan pengelolaan hasil SDA yang terkendali	Tersedianya penatausahaan hasil hutan	80%	90%	100%	100%	100%
		Pemanfaatan dan pengelolaan hasil SDA yang terkendali	Tertibnya peredaran hasil hutan	-	90%	100%	100%	100%
		Meningkatnya penanganan terhadap lahan kritis	Meningkatnya rehabilitasi hutan dan lahan	140 Ha	150 Ha	160 Ha	170 Ha	180 Ha
		Terselenggaranya perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Berkurangnya kerusakan hutan	29.900 Ha	29.760 Ha	29.590 Ha	29.420 Ha	29.240 Ha
		Terselenggaranya perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Terlaksananya perlindungan hutan	56%	65%	85%	100%	100%
		Terbinanya industri hasil hutan	Belum ada pembinaan industri hasil hutan	30 Org	30 Org	30 Org	30 Org	30 Org
		Berkurangnya kasus perambahan hutan	Terkendalinya kerusakan hutan dan lahan	Luas kerusakan hutan dan lahan 27.025 Ha	Luas kerusakan hutan dan lahan 23.825 Ha	Luas kerusakan hutan dan lahan 20.325 Ha	Luas kerusakan hutan dan lahan 19.325 Ha	Luas kerusakan hutan dan lahan 18.278 Ha
		Meningkatnya penanganan terhadap lahan kritis	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan	140 Ha	150 Ha	160 Ha	170 Ha	180 Ha
		Meningkatnya penanganan	Meningkatnya luas lahan					



		terhadap lahan kritis	reboisasi diperkotaan dan pedesaan					
		Terselenggaranya perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Berkurangnya kerusakan hutan	29.900 Ha	29.760 Ha	29.590 Ha	29.420 Ha	29.240 Ha
		Terselenggaranya perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Terlaksananya perlindungan hutan	56%	65%	78%	85%	100%
		Terselenggaranya perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Terlaksananya pembinaan dan penertiban industri hasil hutan	30 Org	30 Org	30 Org	30 Org	30 Org
3.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, profesionalisme, demokratis, bersih, efektif dan efisien	Optimalisasi potensi dan pencapaian target PAD	Meningkatnya produksi dan mutu produk perkebunan kakao dan kelapa	P = 200 Ha R = 400 Ha I = 1130 Ha	P = 200 Ha R = 400 Ha I = 1130 Ha	P = 200 Ha R = 400 Ha I = 1130 Ha	P = 200 Ha R = 400 Ha I = 1130 Ha	P = 200 Ha R = 400 Ha I = 1130 Ha
		Optimalisasi potensi dan pencapaian target PAD	Meningkatnya pengembangan komoditas kehutanan unggulan daerah	25 Ha	30 Ha	35 Ha	40 Ha	50 Ha
4.	Optimalisasi pemanfaatan, pengelolaan dan peningkatan produksi hasil kehutanan dan perkebunan sebagai salah satu upaya menurunkan kemiskinan	Optimalisasi peningkatan kualitas dan kuantitas produksi SDA dalam mendukung perekonomian daerah	Meningkatnya komoditas unggulan daerah	-	Terpenuhinya kebutuhan saprodi pertanian/perkebunan 10 KT	Terpenuhinya kebutuhan saprodi pertanian/perkebunan 10 KT	Terpenuhinya kebutuhan saprodi pertanian/perkebunan 20 KT	Terpenuhinya kebutuhan saprodi pertanian/perkebunan 20 KT
		Tersedianya komoditas unggulan daerah yang berdaya saing	Tersedianya benih unggul produk perkebunan (kelapa, pala dan kakao)	Terpenuhinya benih unggul komoditas kelapa, pala, dan kakao pada 12	Terpenuhinya benih unggul komoditas kelapa, pala, dan kakao	Terpenuhinya benih unggul komoditas kelapa, pala, dan kakao	Terpenuhinya benih unggul komoditas kelapa, pala, dan kakao pada 20 KT	Terpenuhinya benih unggul komoditas kelapa, pala, dan kakao pada 16 KT

				KT	pada 14 KT	pada 16 KT		
		Tersedianya komoditas unggulan daerah yang berdaya saing	Bertambahnya luas tanaman perkebunan	-	Luas areal lahan kakao 50 Ha	Luas areal lahan kakao 50 Ha	Luas areal lahan kakao 50 Ha	Luas areal lahan kakao 50 Ha
		Penerapan teknologi tepat guna dalam pemanfaatan seluruh hasil pertanian secara komprehensif	Tersedianya sarana & prasarana teknologi tepat guna perkebunan	-	1 Unit	1 unit	1 Unit	
		Penerapan teknologi tepat guna dalam pemanfaatan seluruh hasil pertanian secara komprehensif	Meningkatnya hasil komoditas perkebunan	-	-	1 Paket	-	

### 4.3. Strategi dan Kebijakan

#### a. Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)

Analisis SWOT merumuskan empat strategi Utama, yaitu:

1. Strategi S – O, yaitu strategi yang menggunakan kekuatan untuk mencapai atau meraih peluang.
2. Strategi W – O, yaitu strategi untuk menekan kelemahan untuk mencapai atau meraih peluang
3. Strategi S – T, yaitu strategi yang menggunakan kekuatan untuk menghadapi atau menaklukkan tantangan atau ancaman
4. Strategi W – T, yaitu strategi menekan kelemahan untuk menghadapi atau menaklukkan tantangan atau ancaman.

Berdasarkan analisis tersebut, strategi yang dibuat diharapkan bisa lebih maksimal dalam mendayagunakan apa yang ada

untuk kepentingan masa depan, karena didasarkan pada kondisi lingkungan yang riil. Hal ini disebabkan oleh adanya kombinasi untuk memaksimalkan potensi dan meminimalisasi kelemahan.

Tabel 4.2

1. Menciptakan Lingkungan Yang Serasi dan Seimbang melalui Pemanfaatan, Pengelolaan dan Pelestarian Sumber Daya Alam

Faktor Internal	Faktor Eksternal
<p>(+) Kekuatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Banyaknya potensi sumber daya alam</li> <li>2. Kondisi hutan yang cukup luas</li> <li>3. Kepedulian seluruh pemangku kepentingan terhadap pemanfaatan, pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam</li> <li>4. Adanya program penanganan lahan kritis</li> <li>5. Adanya dokumen rencana tata ruang wilayah</li> <li>6. Lahan perkebunan yang cukup luas</li> <li>7. Jumlah petani yang bergerak pada sektor kehutanan dan perkebunan cukup besar</li> </ol>	<p>(+) Peluang</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang tentang pelestarian alam dan lingkungan hidup</li> <li>2. Peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan</li> <li>3. Adanya penegakan hukum lingkungan</li> <li>4. Adanya tradisi dan budaya peduli lingkungan</li> </ol>
<p>(-) Kelemahan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemanfaatan dan pengelolaan hasil SDA yang tidak terkendali</li> <li>2. Banyaknya penebangan / perladangan liar</li> <li>3. Luasnya lahan kritis didalam dan luar kawasan hutan</li> <li>4. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan</li> <li>5. Tidak adanya Perda tentang pengelolaan lingkungan hidup daerah</li> </ol>	<p>(-) Ancaman</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perubahan iklim Global Warning (Pemanasan Global)</li> <li>2. Perambahan hutan akibat pertanian berpindah</li> <li>3. Kebakaran hutan dan lahan</li> <li>4. Semakin meningkatnya luas lahan kritis</li> </ol>

2. Optimalisasi Pemanfaatan, Pengelolaan dan Peningkatan Produksi Kehutanan dan Perkebunan sebagai upaya menurunkan kemiskinan

Faktor Internal	Faktor Eksternal
<p>(+) Kekuatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sumber Daya Alam cukup memadai</li> <li>2. Terdapat komoditas unggulan daerah yang berdaya saing</li> <li>3. Industri hasil pertanian (agroindustri) dan aneka usaha kehutanan yang terus berkembang</li> </ol>	<p>(+) Peluang</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melimpahnya potensi SDA</li> <li>2. Terdapat program nasional Gernas Kakao</li> </ol>
<p>(-) Kelemahan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Potensi SDA yang belum terkelola dengan baik</li> <li>2. Tidak menggunakan teknologi tepat guna dalam pemanfaatan seluruh hasil pertanian secara komprehensif</li> <li>3. Keterbatasan modal petani</li> <li>4. Tersedianya lahan kritis yang belum mendapat penanganan</li> </ol>	<p>(-) Ancaman</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerusakan lingkungan hidup dan degradasi hutan yang semakin meningkat (optimalisasi pengelolaan kehutanan)</li> <li>2. Pemanfaatan SDA yang dikelola masyarakat kurang optimal, khususnya sumber daya alam yang terbaharukan</li> <li>3. Posisi wilayah merupakan kawasan rawan bencana</li> <li>4. Pola penggunaan lahan pertanian yang tidak sesuai ketentuan RTRW</li> </ol>

b. Strategi Pembangunan

Adapun perumusan langkah-langkah untuk menentukan strategi pembangunan, dari hasil metoda analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan) sebagai berikut:

1. Menciptakan Lingkungan Yang Serasi dan Seimbang Melalui Pemanfaatan, Pengelolaan dan Pelestarian Sumber Daya Alam

Strategi untuk mencapai sasaran Misi sebagai berikut:

- 1) Terlaksananya pemanfaatan dan pengelolaan hasil SDA yang terkendali
  - 2) Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA
  - 3) Penyusunan perda pengendalian pemanfaatan hutan
  - 4) Pengendalian kerusakan hutan dan lahan
  - 5) Reboisasi kawasan hutan
  - 6) Rehabilitasi lahan kritis melalui penanaman pohon kawasan perkotaan dan pedesaan
  - 7) Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan
  - 8) Peningkatan pengawasan terhadap kegiatan perambahan hutan lindung
  - 9) Peningkatan peran serta masyarakat dalam konservasi hutan lindung
  - 10) Peningkatan norma, standar, dan kriteria pemanfaatan & pengelolaan sumber daya alam
  - 11) Penyediaan perda pengelolaan sumber daya alam secara proporsional
2. Optimalisasi Pemanfaatan, Pengelolaan dan Peningkatan Produksi Hasil Pertanian, Perkebunan, Kehutanan,

Peternakan, Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu Upaya dalam Menurunkan Kemiskinan.

Strategi untuk mencapai sasaran Misi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kinerja instansi/lembaga teknis
- 2) Ekstensifikasi, intensifikasi, rehabilitasi dan diversifikasi kehutanan dan perkebunan
- 3) Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi kehutanan dan perkebunan
- 4) Meningkatkan posisi tawar dan daya saing produk unggulan daerah
- 5) Mengoptimalkan potensi kehutanan dan perkebunan
- 6) Meningkatkan kemampuan teknis aparat dan masyarakat dalam bidang teknologi produksi
- 7) Mengoptimalkan pengelolaan potensi komoditas unggulan daerah yang berdaya saing
- 8) Memudahkan aksesibilitas pemasaran produk-produk
- 9) Menciptakan iklim investasi yang mendukung pengembangan potensi lokal
- 10) Mengoptimalkan pengembangan potensi kehutanan dan perkebunan
- 11) Meningkatkan sarana dan prasarana kehutanan dan perkebunan
- 12) Mengoptimalkan penerapan teknologi tepat guna dalam memanfaatkan hasil kehutanan dan perkebunan.

c. Arah Kebijakan Pembangunan

Untuk menjabarkan strategi dan agenda pembangunan yang telah ditetapkan maka diperlukan arah kebijakan agar dapat menjadi pedoman bagi pemerintah maupun stakeholder dalam melaksanakan pembangunan serta sebagai dasar untuk menentukan pilihan program dan kegiatan, sesuai tugas dan kewenangannya.

Arah kebijakan pembangunan yang dimaksud disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 4.3.

## Perumusan Arah Kebijakan Pembangunan

No	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
1.	Peningkatan kualitas SDM masyarakat dan aparatur pemerintah	Meningkatnya keterampilan dan profesionalisme kerja masyarakat	Peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan	Meningkatkan pelatihan keterampilan petani yang bergerak di bidang kehutanan dan perkebunan
2.	Menciptakan Lingkungan yang serasi dan seimbang melalui pemanfaatan, pengelolaan dan pelestarian SDA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkurangnya kasus perambahan hutan</li> <li>2. Meningkatnya penanganan terhadap lahan kritis</li> <li>3. Meningkatnya fungsi kawasan lindung dan daerah hijau</li> <li>4. Terselenggaranya perlindungan dan konservasi SDA</li> <li>5. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengendalian kerusakan hutan dan lahan</li> <li>2. Pengembangan kelembagaan rehabilitasi hutan dan lahan</li> <li>3. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi tepat guna perkebunan</li> <li>4. Kegiatan penyuluhan teknologi tepat guna perkebunan</li> <li>5. Pembinaan, pengawasan, pemantauan pupuk/pestisida serta</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan perda pengendalian pemanfaatan hutan</li> <li>2. Pengendalian kerusakan hutan</li> <li>3. Reboisasi kawasan hutan</li> <li>4. Rehabilitasi lahan kritis melalui penanaman pohon kawasan perkotaan dan perdesaan</li> <li>5. Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan</li> <li>6. Peningkatan pengawasan terhadap kegiatan perambahan hutan lindung</li> <li>7. Peningkatan peran serta masyarakat dalam konservasi hutan lindung</li> <li>8. Peningkatan norma, standar, dan kriteria</li> </ol>



			<p>hama penyakit tanaman perkebunan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Pembinaan dan pengawasan kegiatan pengusaha hutan</li> <li>7. Pengelolaan dan pemanfaatan hutan, penatausahaan hasil hutan</li> <li>8. Menata dan mengembangkan hutan kota</li> </ol>	<p>pemanfaatan&amp;pengelolaan sumber daya alam</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>9. Penyediaan perda pengelolaan sumber daya alam secara proporsional</li> <li>10. Peningkatan peran serta masyarakat serta stakeholder dalam pengelolaan lingkungan</li> <li>11. Peningkatan kesadaran masyarakat penting bagi kualitas kelangsungan lingkungan</li> </ol>
3.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, demokratis, bersih, efektif dan efisien	Optimalisasi potensi dan pencapaian PAD	Meningkatnya potensi sumber PAD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inventarisasi potensi pendapatan asli daerah</li> <li>2. Peningkatan potensi daerah untuk peningkatan PAD</li> </ol>
4.	Optimalisasi pemanfaatan, pengelolaan dan peningkatan produksi hasil kehutanan dan perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi peningkatan kualitas dan kuantitas produksi SDA dalam mendukung perekonomian daerah</li> <li>2. Tersedianya komoditas unggulan daerah yang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penurunan angka kemiskinan melalui bantuan langsung Masy. Miskin, Bantuan modal usaha dan penciptaan lapangan pekerjaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kinerja instansi/lembaga teknis</li> <li>2. Eksistensifikasi, intensifikasi, rehabilitasi dan diversifikasi</li> <li>3. Peningkatan kualitas dan kuantitas pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan</li> </ol>

	<p>sebagai salah satu upaya menurunkan kemiskinan</p>	<p>berdaya saing</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Tersedianya jaringan pemasaran produk perkebunan</li> <li>4. Penerapan teknologi tepat guna dalam pemanfaatan seluruh hasil perkebunan secara komprehensif</li> <li>5. Terlaksananya proses nilai tambah produk perkebunan</li> <li>6. Terwujudnya ketahanan pangan daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Meningkatkan hasil produksi sektor kehutanan dan perkebunan</li> <li>3. Pengembangan sentra-sentra produksi pengolahan yang memiliki kemampuan teknologi yang memadai</li> <li>4. Pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan</li> <li>5. optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi kehutanan dan perkebunan</li> </ol>	<p>dan perikanan dalam mendorong daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Meningkatkan posisi tawar dan daya saing produk unggulan daerah</li> <li>5. Mengoptimalkan potensi pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan dan perikanan</li> <li>6. Meningkatkan kemampuan teknis aparat dan masyarakat dalam bidang teknologi produksi</li> <li>7. Mengembangkan kemampuan teknologi industri bagi masyarakat</li> <li>8. Mengoptimalkan pengelolaan potensi komoditas unggulan daerah yang berdaya saing</li> <li>9. Memudahkan aksesibilitas pemasaran produk-produk</li> <li>10. Pembangunan dan pengembangan kawasan agropolitan unggulan daerah</li> <li>11. Menciptakan iklim investasi yang mendukung pengembangan potensi lokal</li> <li>12. Mengoptimalkan, pengembangan potensi kehutanan dan</li> </ol>
--	---	--	--	---

				<p>perkebunan</p> <p>13. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan dan perikanan</p> <p>14. Mengoptimalkan penerapan teknologi tepat guna dalam memanfaatkan hasil kehutanan dan perkebunan</p>
--	--	--	--	--

## **BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan jangka menengah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majene berisi program dan kegiatan prioritas, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk memenuhi layanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam menyelenggarakan urusan pertanian dan kehutanan. Adapun pagu indikatif kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan.

Adapun rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majene disajikan pada Tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1  
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator  
Dinas Kehutanan dan Perkebunan  
Provinsi Sulawesi Barat Kabupaten Majene

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan output	Data Capaian pada awal tahun	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
									Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
									target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Menciptakan lingkungan yang serasi dan seimbang melalui pemanfaatan, pengelolaan dan pelestarian SDA	Pemanfaatan dan pengelolaan hasil SDA yang terkendali	Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan hasil SDA yang terkendali	2	01	15	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya alam	-														
	Pemanfaatan dan pengelolaan hasil SDA yang terkendali	Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan hasil SDA yang terkendali				Kegiatan Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung	Terbentuknya KPH	-	-	-	1 Unit	150.00 0.000	1 Unit	165.00 0.000	1 Unit	181.50 0.000	1 Unit	199.65 0.000	4 Unit	496.6 99.65 0	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Majene

	Pemanfaatan dan pengelolaan hasil SDA yang terkendali	Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan hasil SDA yang terkendali					Kegiatan Pengembangan Hutan Tanaman	Tersedianya hutan tanaman	-	-	-	10 Ha	60.000.000	10 Ha	66.000.000	10 Ha	72.600.000	10 Ha	79.860.000	40 Ha	278.460.000	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Majene
	Pemanfaatan dan pengelolaan hasil SDA yang terkendali	Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan hasil SDA yang terkendali					Kegiatan Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu	Berkembangnya Hasil Hutan Non Kayu	-	-	-	25 Ha	150.000.000	25 Ha	165.000.000	25 Ha	181.500.000	25 Ha	199.650.000	100%	696.150.000	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Majene
	Pemanfaatan dan pengelolaan hasil SDA yang terkendali	Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan hasil SDA yang terkendali					Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan	Tertibnya penatausahaan	80%	90%	24.420.000	100%	26.862.000	100%	29.584.000	100%	32.503.000	100%	35.753.000	100%	149.086.000	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Majene
	Pemanfaatan dan pengelolaan hasil SDA yang terkendali	Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan hasil SDA yang terkendali					Kegiatan Pengembangan Pengujian dan Peredaran Hasil Hutan	Tertibnya peredaran hasil hutan	-	90%	11.200.000	100%	12.320.000	100%	13.552.000	100%	14.907.000	100%	16.398.000	100%	68.377.000	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Majene
	Menigkatnya penanganan terhadap lahan kritis	Meningkatnya rehabilitasi hutan dan lahan	2	02	16		Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Meningkatnya rehabilitasi hutan dan lahan															

	Meningkatnya penanganan terhadap lahan kritis	Meningkatnya rehabilitasi hutan dan lahan				Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Reboisasi dan Penghijauan Daerah	Terkoordinasi ya penyelenggara an Reboisasi dan Penghijauan	-	-	-	1 Tim	27.500 .000	1 Tim	30.250 .000	1 Tim	33.275 .000	1 Tim	36.602 .500	1 Tim	127.627.500	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Majene
--	---	---	--	--	--	--	---	---	---	---	-------	-------------	-------	-------------	-------	-------------	-------	-------------	-------	-------------	--------------------------------	--------

Meningkatnya penanganan penangan terhadap lahan kritis	Meningkatnya rehabilitasi hutan dan lahan				Kegiatan Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan	Tersedianya bibit tanaman kayu-kayuan dan MPTS (Mahoni, Gmelina, Trembesi, Jati Lokal, Sengon, Glodokan, Bitti, Mangga Okulasi, Durian Okulasi, Rambutan, Kemiri, Jambu Mente, Falm, Cemara laut dan Ketapang)	1 Jenis	4 Jenis	53.000.000	15 Jenis	200.000	15 Jenis	220.000.000	15 Jenis	242.000.000	15 Jenis	266.200.000	15 Jenis	781.400.000	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Majene
--	---	--	--	--	--	--	---------	---------	------------	----------	---------	----------	-------------	----------	-------------	----------	-------------	----------	-------------	--------------------------------	--------



	Meningkatnya penanganan terhadap lahan kritis	Meningkatnya rehabilitasi hutan dan lahan				Kegiatan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Terbina, terkendali dan terawasinya Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	1 Paket	-	-	1 Tim	25.000.000	1 Tim	25.000.000	1 Tim	25.000.000	1 Tim	25.000.000	4 Tim	100.000.000	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Majene
	Meningkatnya penanganan terhadap lahan kritis	Meningkatnya rehabilitasi hutan dan lahan				Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Meningkatnya rehabilitasi hutan dan lahan	130 Ha	140 Ha	1.428.000	150 Ha	1.570.800	160 Ha	2.500.000.000	170 Ha	3.000.000.000	180 Ha	3.500.000.000	800 Ha	11.998.000.000	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Majene
	Meningkatnya penanganan terhadap lahan kritis	Meningkatnya rehabilitasi hutan dan lahan				Kegiatan Reboisasi dan Penghijauan	Meningkatnya luas lahan kritis yang direboisasi	60 Ha	3100 Ha	1.240.000.000	3300 Ha	1.650.000	3500 Ha	1.750.000.000	3800 Ha	1.900.000.000	4000 Ha	2.000.000.000	4000 Ha	8.540.000.000	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Majene
	Terselenggaranya perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam				Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Berkurangnya Kerusakan Hutan															

	Terselenggaranya perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Berkurangnya kerusakan hutan				Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Kerusakan Hutan	Berkurangnya Kerusakan Hutan	30.040 Ha	29.900 Ha	50.000.000	29.760 Ha	55.000.000	29.590 Ha	60.500.000	29.420 Ha	66.550.000	29.240 Ha	73.205.000	800 Ha	805.255.000	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Majene
	Terselenggaranya perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Berkurangnya kerusakan hutan				Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Terlaksananya perlindungan hutan	46%	56%	128.130.000	65%	140.943.000	78%	155.037.000	85%	170.541.000	100%	187.595.000	100%	282.246.000	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Majene
	Terselenggaranya perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Meningkatnya pembinaan dan penertiban industri hasil hutan				Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan	Belum ada pembinaan industri hasil hutan															Majene
	Terselenggaranya perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Meningkatnya pembinaan dan penertiban industri hasil hutan				Kegiatan Pembinaan Industri Hasil Hutan	Belum ada pembinaan industri hasil hutan	-	-	-	30 Orang	50.000.000	30 Orang	55.000.000	30 Orang	60.500.000	30 Orang	66.550.000	30 Orang	232.050.000	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Majene

Optimalisasi pemanfaatan, pengelolaan dan peningkatan produksi hasil kehutanan dan perkebunan sebagai salah satu upaya menurunkan kemiskinan	Optimalisasi peningkatan kualitas dan kuantitas produksi SDA dalam mendukung perekonomian daerah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi SDA dalam mendukung perekonomian daerah	2	01	15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya kesejahteraan petani															
	Tersedianya komoditas unggulan daerah yang berdaya saing	Meningkatnya potensi komoditas unggulan daerah dan tercapainya PAD				Kegiatan Pengembangan Pertanian pada Lahan Kering	Bertambah luas areal tanaman perkebunan	-	-	-	50 Ha	375.000.000	50 Ha	375.000.000	50 Ha	375.000.000	50 Ha	375.000.000	200 Ha	1.500.000	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Majene
	Meningkatnya keterampilan dan profesionalisme kerja masyarakat	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani				Kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan serta penerapan teknologi perkebunan	Jumlah petani dan pelaku agribisnis yang sudah dilatih 30 Orang	-	-	Terlatih petani dan pelaku agribisnis 60 Orang	60.000.000	Terlatih petani dan pelaku agribisnis 60 Orang	60.000.000	Terlatih petani dan pelaku agribisnis 90 Orang	90.000.000	Terlatih petani dan pelaku agribisnis 120 Orang	120.000.000	Terlatih petani dan pelaku agribisnis 330 Orang	330.000.000	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Majene

	Terwujudnya ketahanan pangan daerah	Meningkatnya ketahanan pangan	2	01	16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Meningkatnya ketahanan pangan																
	Tersedianya komoditas unggulan daerah yang berdaya saing	Meningkatnya ketersediaan komoditas unggulan daerah yang berdaya saing				Kegiatan Pengembangan Perbenihan/ Pembibitan	Tersedianya benih unggul produk perkebunan	Terpe nuhin ya benih komo ditas kelap a, pala dan kakao pada 8 KT	Terpe nuhin ya benih komo ditas kelap a, pala dan kakao pada 8 KT	31.47 0.000	Terpe nuhin ya benih komo ditas kelap a, pala dan kakao pada 12 KT	50.00 0.000	Terpe nuhin ya benih komo ditas kelap a, pala dan kakao pada 16 KT	50.00 0.000	Terpe nuhin ya benih komo ditas kelap a, pala dan kakao pada 20 KT	50.00 0.000	Terpe nuhin ya benih komo ditas kelap a, pala dan kakao pada 16 KT	50.00 0.000	Terpe nuhin ya benih komo ditas kelap a, pala dan kakao pada 16 KT	231.4 70.00 0	Terpe nuhin ya benih komo ditas kelap a, pala dan kakao pada 78 KT	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Majene

	Tersedianya komoditas unggulan daerah yang berdaya saing	Meningkatnya ketersediaan komoditas unggulan daerah yang berdaya saing					Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pasar	Tersedianya sistem informasi harga produk perkebunan dan terlaksananya peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi	Terse dia infor masi harga pada 8 keca mata n	Terse dia infor masi harga pada 8 keca mata n	20.00 0.000	Terse dia infor masi harga pada 8 keca mata n	45.00 0.000	Terse dia infor masi harga pada 8 keca mata n	50.00 0.000	Terse dia infor masi harga pada 8 keca mata n	50.00 0.000	Terse dia infor masi harga pada 8 keca mata n	80.00 0.000	Tersedia informasi harga pada 8 kecamatan	245.000.000	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Majene
	Optimalisasi Potensi dan Pencapaian target PAD	Optimalnya potensi dan pencapaian PAD					Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan	Meningkatnya produksi dan mutu produk perkebunan kakao dan kelapa	P=2100 Ha, R=5300 Ha, I=3400 Ha	P=200 Ha, R=400 Ha, I=1130 Ha	115.800.000	P=600 Ha, R=200 Ha, I=1500 Ha	675.000.000	P=500 Ha, R= - Ha, I=500 Ha	P=450 Ha, R= - Ha, I=1000 Ha	P=450 Ha, R= - Ha, I=1130 Ha	P=2200 Ha, R=600 Ha, I=5260 Ha	575.000.000	575.000.000	2.485.800.000	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Majene	
	Optimalisasi Potensi dan Pencapaian target PAD	Optimalnya potensi dan pencapaian PAD	2	01	17		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	Meningkatnya pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan															Majene

	Optimalisasi Potensi dan Pencapaian target PAD	Optimalnya potensi dan pencapaian PAD					Kegiatan promosi atas Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Unggulan Daerah	Berkembangnya mitra usaha bagi produk perkebunan	Mitra usaha yang saat ini hanya pada 1 komoditi (kaka o)	Diupayakan mitra usaha untuk 3 produk (kaka o, kelapa, kemiri)	20.00 0.000	Diupayakan mitra usaha untuk 3 produk (kaka o, kelapa, kemiri)	45.00 0.000	Diupayakan mitra usaha untuk 4 produk (kaka o, kelapa, kemiri, cengkeh)	50.00 0.000	Diupayakan mitra usaha untuk 6 produk (kaka o, kelapa, kemiri, cengkeh, pala, kopi)	50.00 0.000	Diupayakan mitra usaha untuk 6 produk (kaka o, kelapa, kemiri, cengkeh, pala, kopi)	50.00 0.000	Diupayakan mitra usaha untuk 6 produk (kaka o, kelapa, kemiri, cengkeh, pala, kopi)	215.00 0.000	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Majene
	Meningkatnya keterampilan dan profesionalisme kerjasama masyarakat	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani	2	01	18		Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	Meningkatnya penerapan teknologi Pertanian/ Perkebunan															

	Meningkatnya keterampilan dan profesionalisme kerja masyarakat	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani				Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Tersedianya sarana dan prasarana teknologi tepat guna	Kurangnya sarana dan prasarana teknologi tepat guna	-	-	Terseainya sarana dan prasarana teknologi tepat guna 1 Unit	175.000.000	Terseainya sarana dan prasarana teknologi tepat guna 1 Unit	175.000.000	Terseainya sarana dan prasarana teknologi tepat guna 1 Unit	175.000.000	Terseainya sarana dan prasarana teknologi tepat guna 1 Unit	120.000.000	Tersedianya sarana dan prasarana teknologi tepat guna 1 Unit	645.000.000	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Majene
	Meningkatnya keterampilan dan profesionalisme kerja masyarakat	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani				Kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Meningkatnya keterampilan penggunaan alat teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Jumlah petani terlatih/terampil 30 Orang	-	-	Terlatihnya petani 30 Orang	33.000.000	Terlatihnya petani 30 Orang	36.000.000	Terlatihnya petani 30 Orang	39.000.000	Terlatihnya petani 30 Orang	42.000.000	Terlatihnya petani 120 Orang	150.000.000	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Majene

	Meningkatnya keterampilan dan profesionalisme kerja masyarakat	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani					Kegiatan Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Modern Bercocok Tanam	Meningkatnya penerapan teknologi pertanian/ perkebunan	Penerapan teknologi pertanian/ perkebunan 50%	Penerapan teknologi pertanian/ perkebunan 60%	20.180.000	Penerapan teknologi pertanian/ perkebunan 70%	25.000.000	Penerapan teknologi pertanian/ perkebunan 80%	30.000.000	Penerapan teknologi pertanian/ perkebunan 90%	35.000.000	Penerapan teknologi pertanian/ perkebunan 100%	40.000.000	Penerapan teknologi pertanian/ perkebunan 60%	150.180.000	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Majene
	Optimalisasi peningkatan kualitas dan kuantitas produksi SDA dalam mendukung perekonomian daerah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi SDA dalam mendukung perekonomian daerah	2	01	18		Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan															Dinas Kehutanan dan Perkebunan	



	Optimalisasi peningkatan kualitas dan kuantitas produksi SDA dalam mendukung perekonomian daerah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi SDA dalam mendukung perekonomian daerah				Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan	Tersedianya sarana produksi untuk petani komoditi kelapa dan kakao	Terpe nuhin ya benih komo ditas kelapa, pala dan kakao pada 8 KT	-	-	Terpe nuhin ya kebut uhan sapro di perta nian/ perke bunan 10 KT	35.00 0.000	Terpe nuhin ya kebut uhan sapro di perta nian/ perke bunan 10 KT	35.00 0.000	Terpe nuhin ya kebut uhan sapro di perta nian/ perke bunan 20 KT	70.00 0.000	Terpe nuhin ya kebut uhan sapro di perta nian/ perke bunan 20 KT	70.00 0.000	Ter pen uhi nya kebut uhan sapro di perta nian/ per ke bunan 60 KT	210.0 00.00 0	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Majene
	Optimalisasi peningkatan kualitas dan kuantitas produksi SDA dalam mendukung perekonomian daerah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi SDA dalam mendukung perekonomian daerah				Kegiatan Pemberantasan Hama/penyakit Tanaman Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya produktivitas tanaman perkebunan (Kakao)	Produ ktivit as tana man kakao saat ini 824 kg/ha	Produ ktivit as tana man kakao saat ini 900 kg/ha	20.00 0.000	Produ ktivit as tana man kakao saat ini 1050 kg/ha	50.00 0.000	Produ ktivit as tana man kakao saat ini 1200 kg/ha	70.00 0.000	Produ ktivit as tana man kakao saat ini 1400 kg/ha	80.00 0.000	Produ ktivit as tana man kakao saat ini 1500 kg/ha	100.0 00.00 0	Produ ktivit as tan am an kak ao saat ini 150 0 kg/ha	320.0 00.00 0	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Majene

## **BAB VI. INDIKATOR KINERJA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN MAJENE YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Indikator kinerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majene yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majene periode 2012 – 2016 ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan setiap tahun

TABEL 6.1

INDIKATOR KINERJA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN MAJENE YANG MENGACU PADA TUJUAN RPJMD DAN SASARAN RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terbentuknya KPH	-	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	4 Unit
2	Tersedianya hutan tanaman	-	-	10 Ha	10 Ha	10 Ha	10 Ha	40 Ha
3	Berkembangnya hasil hutan non kayu	-	-	25 Ha	25 Ha	25 Ha	25 Ha	
4	Tersedianya penatausahaan hasil hutan	80%	90%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Terbitnya peredaran hasil hutan	-	90%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Terkoordinasinya penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan	-	-	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim
7	Tersedianya bibit tanaman kayu-kayuan dan MPTS	1 Jenis	4 Jenis	15 Jenis	15 Jenis	15 Jenis	15 Jenis	15 jenis
8	Terbina, terkendali dan terawasinya Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	1 Paket	-	1 Tim	1 Tim	1 Tim	1 Tim	4 Tim
9	Meningkatnya rehabilitasi hutan dan lahan	130 Ha	140 Ha	150 Ha	160 Ha	170 Ha	180 Ha	800 Ha
10	Berkurangnya kerusakan hutan	30.040 Ha	29.900 Ha	29.760 Ha	29.590 Ha	29.420 Ha	29.240 Ha	800 Ha

11	Terlaksananya Perlindungan Hutan	46%	56%	65%	78%	85%	100%	100%
12	Belum ada pembinaan industri hasil hutan	-	-	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang
13	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan serta penerapan teknologi perkebunan	30 Orang	-	60 Orang	60 Orang	90 Orang	120 Orang	330 Orang
14	Meningkatnya penerapan teknologi pertanian/perkebunan	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%
15	Meningkatnya keterampilan penggunaan alat teknologi tepat guna	30 Orang	-	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	120 Orang
16	Tersedianya sarana dan prasarana teknologi tepat guna	-	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	4 Unit











